

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak tahun 2017 kota Yogyakarta

Di dalam Undang-Undang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil.

3.1.1. Kegiatan sebelum pemilihan

3.1.1.1. Sosialisasi Pemilu

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik serta sosialisasi bisa dibidang sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak

sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedur saja seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang berkompeten.

Didalam tugas pokok KPUD Kota Yogyakarta pada poin sebagai penyelenggara yang artinya disini adalah memulai dari tahap mendata pasangan calon, setelah itu, menetapkan pasangan calon, setelah itu mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon ke masyarakat. Hal ini senada dengan UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum bagian ketiga paragraf 3 pasal 10 yang dimana tugas KPUD untuk menyusun menganggarkan serta menyusun jadwal kegiatan dalam pemilukada.

Didalam kegiatan sebelum pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 dilaksanakan, KPU telah menyusun rencana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum Disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi ini merupakan pengenalan pasangan calon kepada masyarakat agar mengerti dan memahami visi dan misi pasangan calon tersebut.

Tabel 3.1
Rangkaian Kegiatan Pemilukada

No.	Rangkaian kegiatan dalam pemilukada oleh KPUD kota Yogyakarta
1.	Penyuluhan sosialisasi
2.	Pemberian informasi penting
3.	Pengenalan Partai Politik secara umum
4.	Profil calon
5.	Program masing-masing kandidat
6.	Simulasi secara serentak di 14 kecamatan

Adapun rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri adalah :

1. Pendataan penyandang disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta

Didalam proses ini KPU Yogyakarta melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, untuk mengetahui berapa jumlah data DPS yang dimiliki setiap organisasi disabilitas tersebut. Dan setelahnya di data untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap.

“Kami memastikan tidak hanya difabel saja tapi kelompok minoritas yang ada untuk masuk di daftar pemilih. Kami mengundang seluruh teman teman komunitas seluruh Yogyakarta ke Kpu untuk memastikan apakah teman-teman anggota sudah masuk semua, dari proses DPS kemudian di DPT kita mendapati peningkatan jumlah difabel 837, itu pertamanya baru tujuh ratusan, kemudian setelah proses DPS kami verifikasi terus ke organisasi-organisasi difabel, terus menjadi 837. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU tanggal 10 juli 2017)

2. Pengelompokan jenis-jenis Disabilitas

Setelah semua data terkumpul dan diterima oleh KPU, maka data tersebut akan di tindak lanjuti dan di evaluasi oleh KPU dengan tujuan pengelompokan jenis disabilitas ini agar nanti bisa mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan kaum disabilitas pada hari pencoblosan di setiap TPS, seperti untuk tuna netra disediakan templet dan untuk Tuna Daksa apabila mengalami kendala dalam proses pemilihan akan di jemput oleh petugas KPU serta untuk tuna rungu dan wicara disediakan enterpretur atau penertjemah bahasa isyarat.

“Di hari H nanti akan kita sediakan templet wajib di 794 TPS kalau bicara soal aksesibilitas dalam pemungutan suara kalau perlu pendamping ya pendamping akan kami sertakan, nah sedangkan untuk yang tuna rungu dan wicara itu kami sediakan enterpretur sebagai penerjemah bahasa isyarat, kalau tuna daksa di tempat TPS itu sudah kami atur sesuai simulasi yang dilakukan dalam memudahkan penyandang Disabilitas Tuna Dakasa berpartisipasi, kalau perlu di jemput ya di jemput”. (wawancara Ibu Rani Komisioner KPUD Kota Yogyakarta 10 juli 2017)

Tabel 3.2
Pengelompokan Jenis Disabilitas

No.	Nama kecamatan	Pemilih	Jumlah pemilih pemula	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas lainnya
1.	Danurejan	16.374	471	4	3	15	5	2
2.	Gendongtengen	15.070	433	11	8	14	8	1
3.	Gondomanan	11.647	314	19	3	9	4	4
4.	Jetis	19554	545	19	10	15	4	10
5.	Kotagede	23.054	660	24	17	17	28	8
6.	Kraton	17.117	511	25	10	16	14	5
7.	Mantrijeron	25.661	725	24	14	11	17	8
8.	Mergangsan	23.881	669	24	8	17	5	1
9.	Nagampilan	12.898	365	8	5	10	4	1
10.	Pakualamaan	8.424	238	4	5	4	4	9
11.	Tegalrejo	26.351	746	11	12	20	16	9
12.	Umbulharjo	47.683	1.422	26	16	17	6	2
13.	Wirobrajan	20.384	555	29	14	33	22	5
14.	Gondokusumo	30.891	882	16	10	22	26	10
	Jumlah	298.989	8.536	224	135	220	163	75
	Jumlah Difabel	837						

3. KPU membuat sosialisasi bimbingan secara teknis untuk penggiat organisasi seperti SIGAB agar mampu membantu Kpu mensosialisasikan pemilukada ini kepada teman-teman difabel.

“Memang ada KPUD Kota Yogyakarta memanggil perwakilan dari SIGAB dalam rangka mendiskusikan tentang sosialisasi ini ke pada difabel. Akan tetapi kami disitu hanya sekedar memberikan saran kepada KPU dan menyuruh KPU yang melakukan tugasnya, SIGAB

tidak mau mengambil peran oleh lembaga negara yang seharusnya dilakukan”. (wawancara Bapak Haris SIGAB 11 Juli 2017)

4. KPU sendiri melakukan sosialisasi tatap muka kepada Penyandang Disabilitas, dalam upaya memberikan akses informasi terkait Pemilihan Kota Yogyakarta 2017. Disini KPU mengundang semua penyandang disabilitas secara pengkategorian kecacatan untuk menghadiri pertemuan. Itu dilakukan pada bulan november 2016 (wawancara Ibu RANI Komisioner KPU Kota Yogyakarta 10 Juli 2017).

“Kami bekerjasama dengan teman-teman dan dibantu oleh mahasiswa bersama dengan PPKPPS masuk ke komunitas. Dan kemudian kami membuat DCT tapi berisi visi dan misi partai pendukung, jumlah kursi masing-masing calon. Jadi ada 2 pasangan calon kami buat dalam bentuk drail kita cetak dan kita distribusikan ke kelompok-kelompok Tuna Netra, untuk yang Tuna Rungu kami slalu melibatkan interpreterjadi sosialisasinya berbeda untuk setiap kecacatan”. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 10 Juli 2017).

Dalam sosialisasi pemilihan ini KPU sendiri juga melibatkan narasumber Andhi sebagai penggiat organisasi Tuna Rungu, untuk membuat video yang ditayangkan di seluruh Kota Yogyakarta. Dalam mensosialisasikan Pemilihan ini kepada penyandang disabilitas tentunya memiliki cara tersendiri. Untuk yang Tuna Netra telah di pesiapkan oleh KPU sebelum diundang, untuk penyandang Disabilitas Tuna Netra telah di buatkannya templet yang berisikan pasangan calon serta visi misi calon. Lain halnya dengan penyandang Disabilitas Tuna Daksa, penyandang

Disabilitas Tuna Daksa ini cara KPU mensosialisasikan dengan langsung mendatangi komunitas tuna daksa, cara ini juga berlaku untuk penyandang Tuna Grahita yang dengan cara KPU mendatangi langsung kesekolah sekolah SLB. Dan cara sosialisasi pemilukada kepada penyandang Tuna Rungu itu KPU mendatangkan penerjemah bahasa isyarat serta menampilkan video yang berisikan visi misi calon.

”Saya selalu komunikasi terus dengan teman teman karena dulunya saya bagian dari mereka. Di teman teman Tuna Grahita kami coba melakukan proses sosialisasi masuk ke sekolah SLB kemudian juga ke kelompok-kelompok Tuna Grahita. Kemudian kami menjaring dari teman-teman organisasi perempuan. Misalnya NARASITA bersamaan teman-teman yang lain ada disitu teman disabilitas yang kemudian kami libatkan untuk proses sosialisasi”. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta 7 Juli 2017)

5. Menyelenggarakan simulasi pada saat pemilukada berlangsung

Hal senada pun diakui oleh salah satu penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kota Jogja yang juga aktif di kenggotaan SIGAB sebagai pengurus web SOLIDER SIGAB yaitu bernama mas Ajiwan. Dalam hal sosialisasi yang dilakukan KPU dalam mengajak penyandang Disabilitas Tuna Netra sudah sangat aksesibel pada pemilukada tahun 2017 ini. Tidak seperti pada pemilukada sebelumnya yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, yang mana pada tahun 2011 segala aksesibilitas serta komunikasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah khususnya KPU tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi hal ini dianggap kurang bagi penyandang Disabilitas Tuna Rungu serta Tuna Daksa. Sebagaimana diketahui dari penuturan ke dua

narasumber itu bahwasannya pada saat simulasi pun informasi yang diterima oleh penyandang Disabilitas Tuna Daksa tidak cukup jelas, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan akan hari pencoblosan tentang fasilitas apa saja yang telah di siapkan oleh KPUD Kota Yogyakarta.

“Tentang sosialisai kemarin yang didapat sudah cukup. Kemarin kan dari mbak Sri Surani dan temen-temen sangat kooperatif dalam merangkul dan mendorong oraganisasi teman teman disabilitas kota untuk ikut terlibat aktif dalam pemilukada.” (wawancara dengan mas Ajiwan Tuna Netra tanggal 12 Juli 20017)

“Dalam sosialisasi mereka sudah melibatkan orang tuli dan organisasi seperti GERKATIN dan DAC, tapi waktu itu banyak yang gak bisa hadir karena masalah waktu dan ada yang kurang tertarik”. (wawancara Tuna Rungu dan Wicara Andhi 13 Juli 2017)

Pemahaman tentang politik yang paling mendasar terkait dengan pemilukada bisa dilihat dari pemahaman para pemilih tentang arti pemilu itu sendiri. Secara umum para penyandang disabilitas dalam penelitian ini belum sepenuhnya mengetahui makna dari Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota yakni untuk memilih calon pemimpin yang akan mewakili mereka pada tingkata kota. Calon Walikota terpilih ini dianggap sebagai perwakilan mereka yang bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi penyandang disabilitas, seperti yang dikatakan oleh narasumber Tuna Netra :

“Kalau bicara Pilwali saya salah satu pemilih yang menyenangi Pilwali, karena langsung berdampak ke warga Kota Jogja dan sedikit banyak

menikmati, memakai fasilitas, ini kudu mesti terlibat”. (wawancara narasumber Tuna Netra Ajiwan 12 Juli 2017)

Mereka juga mengetahui bahwa calon-calon yang ada dalam pemilukada diusung oleh partai-partai politik tapi tidak sedikit pula yang mengerti. Namun demikian, hampir semua dua dari tiga narasumber tidak memahami hakekatnya. Mereka tidak mengerti pemilukada itu untuk memilih siapa dan untuk apa. Disinilah letak pentingnya sosialisasi pemilukada bagi penyandang disabilitas yang disampaikan oleh KPUD Kota Yogyakarta. Tentunya didalam sosialisasi ini KPU melakukan kegiatan pengenalan calon, lalu KPUD Kota Yogyakarta didalam sosialisasinya itu memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya.

“Saya gak ikut kegiatan yang di adakan oleh KPUD Kota Yogya sendiri karena saya anggap itu gak penting mas. Wong aku gak dapet apa apa dari yang kayak begituan, mau paham politik juga buat apa toh mereka juga gak mikirin kita”. (wawancara penyandang Tuna Daksa M. Barokah 14 Juli 2017)

Dengan adanya proses sosialisasi politik ini masyarakat disabilitas dapat merubah sikap politiknya. Sikap politik yang dimaksud adalah peserta sosialisasi dikenalkan pentingnya pemilihan wali kota dan wakil walikota dalam pemilukada yang akan diadakan. Tentunya KPUD kota Yogyakarta sendiri memfokuskan pemahaman untuk partisipasi politik Penyandang Disabilitas.

“Jadi KPUD Kota Yogyakarta berkomitmen penuh untuk memastikan kaum Difabel untuk ikut bisa memenuhi haknya, bicara hak itu, hak memilih itu dimulai dari daftar pemilih, sosialisasi sampai pada hari H

pelaksanaan.(wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara PemiluKada memfasilitasi melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dalam rangka pemberian informasi terkait pelaksanaan PemiluKada dalam rangka pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas. Materi yang disampaikan yaitu berupa bagaimana cara memilih, kapan memilih, dan siapa saja calon kandidatnya. KPU Kota Yogyakarta sendiri sangat memperhatikan Penyandang Disabilitas ini, oleh karena itu KPU Kota Yogya pada tahun 2014 mendapat award se Indonesia sebagai Kota dan Kabupaten terbaik dalam memfasilitasi kelompok disabilitas. KPU sendiri membuat terobosan dalam PemiluKada 2017 kemarin dengan mengundang seluruh DPS disabilitas untuk memastikan semuanya masuk ke daftar pemilih sementara yang nantinya akan menjadi DPT. Secara berkesinambungan KPU sendiri tentunya juga melibatkan 10 organisasi khusus Penyandang Disabilitas untuk membantu KPU sendiri dalam hal pendataan serta untuk memastikan apakah anggota dari organisasi tersebut sudah terdaftar semuanya atau belum. Sebab dalam hal ini KPU sendiri masih mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi tentang Penyandang Disabilitas.

“Kami mengundang DPS serta komunitas Difabel yang nantinya menjadi DPT untuk memastikan Kaum Difabel ini sudah benar-benar masuk ke DPS atau belum, dan hasilnya luar biasa ternyata banyak teman-teman yang belum masuk DPS kita. Dan walaupun sudah masuk, tapi tidak masuk dalam DPT Difabel, tapi masuk ke pemilihan umum. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Yogyakarta tanggal 10 Juli 2017)

KPU sendiri mengemban tugas dalam hal mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pemilu Kota Yogyakarta. Dari setiap tahunnya kecenderungan masyarakat yang bersikap pasif serta tidak peduli akan sebuah partisipasi dalam politik, banyak sekali terjadi golput suara disabilitas daripada memanfaatkan hak pilih misalnya, atau kurangnya minat mengikuti pemilihan umum khususnya dalam Pemilu sendiri. Melihat hal itu KPU berinisiatif untuk melibatkan organisasi disabilitas, seperti SIGAB, SAPDA, NARACITA DLL. Keterlibatan organisasi ini akan lebih membantu memvalidkan data penyandang disabilitas.

“Dari proses DPS kemudian di DPT kita mendapati peningkatan jumlah Difabel 837, itu pertamanya baru tujuh ratusan, kemudian setelah proses DPS kami verifikasi terus ke organisasi-organisasi Difabel, terus menjadi 837” (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta 10 Juli 2017)

Di dalam kegiatan sebelum pemilihan ini, dapat dilihat keterkaitan antara KPU sendiri dengan organisasi-organisasi Disabilitas. Disini dapat dilihat bahwasannya keterkaitan antara KPU yang berperan mengajak organisasi Disabilitas untuk ikut serta andil dalam penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai bentuk partisipasi yang konvensional. Menurut Abramsom dan Hardwick partisipasi politik dalam bentuk konvensional adalah:

- a. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik, karena tujuan dari partai politik ialah menduduki jabatan publik. Sedangkan

kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut.

- b. Kegiatan kampanye-kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

Disini KPU sangat serius dalam mengupayakan dalam mendata serta mengajak organisasi Disabilitas. Dikarenan KPU sendiri menyadari betapa pentingnya hak kesetaraan yang perlu ditunjukkan kepada kaum minoritas seperti penyandang Disabilitas. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sendiri memiliki tujuan agar penyandang disabilitas ini mempunyai pandangan akan hak-hak mereka serta memberikan pemahaman politik tentang pentingnya sebuah partisipasi didalam politik ini. Semua itu bertujuan membuat Pemilu yang demokratis dan inklusif, yang artinya terbuka dan terpenuhi hak pilih.

3.1.1.2. Menghubungi organisasi Disabilitas

Dalam kegiatan sosialisasi Pemilu pemerintah menghubungi organisasi-organisasi Disabilitas hal ini berguna selain pendataan juga sebagai upaya KPU memperluas jaringan alam mengoptimalkan sosialisasi Pemilu ini sendiri. Organisasi Disabilitas ini akan memperkenalkan calon Pemilu kepada anggota anggotanya, guna memberikan pemahaman akan visi dan misi calon. Kelompok organisasi ini juga bertugas memberikan pemahaman kepada

Penyandang Disabilitas akan pentingnya hak dan kewajiban mereka. Karena menyumbangkan hak suaranya itu merupakan salah satu bentuk sumbangsih terhadap negara yang dimiliki oleh partisipan Disabilitas. Pendidikan politik yang dilakukan oleh organisasi Disabilitas sendiri dilakukan oleh SIGAB, SABDA, NAWACITA, serta LSM lainnya yang terdiri dari mahasiswa bahkan dari kalangan Disabilitas itu sendiri.

Dari sosialisasi yang dilakukan oleh SIGAB sebagai organisasi penggiat Disabilitas, mereka berpendapat bahwasannya masih banyak sekali Penyandang Disabilitas yang masih kurang faham akan pentingnya demokrasi bagi negara. Demokrasi sendiri merupakan bagian dari kebebasan memiliki hak suara dan berpendapat. Tentunya ini merupakan sebuah fenomena yang sangat disayangkan. Dan hanya segelintir dari mereka yang faham akan berdemokrasi dan menyumbangkan hak suaranya pada setiap pemilihan umum, tanpa terkecuali dalam Pilkada ini.

“Dalam hal ini kita mendorong KPU untuk lebih akses terhadap Penyandang Disabilitas”. (wawancara Pak Haris SIGAB 11 Juli 2017)

Mereka yang faham akan pentingnya berdemokrasi ini rata-rata Penyandang Disabilitas yang aktif dalam organisasi dan bermasyarakat. demokrasi sendiri sebenarnya akan berdampak kepada kehidupan Disabilitas itu sendiri di masa yang akan datang. Karena demokrasi yang mereka gunakan merupakan hak suara dalam memilih pemimpin daerah, yang dimana pemimpin daerah ini akan membuat sebuah implementasi kebijakan yang akan nantinya dirasakan oleh Penyandang Disabilitas itu sendiri.

Hal tersebutlah yang berusaha di sadarkan oleh SIGAB kepada Penyandang Disabilitas. Dalam proses pendidikan politik SIGAB juga mempunyai anggotanya yang sangat aktif bekampanye tentang pentingnya berdemokrasi dan serta berpartisipasi menggunakan hak suaranya, salah satunya adalah ibu Widi. Ibu Widi ini adalah penyandang Disabilitas Daksa yang ikut melakukan pendidikan politik seperti yang SIGAB lakukan. Beliau berusaha menyadarkan teman-teman Disabilitas yang masih kurang serta tidak mengerti tentang pemahaman politik didalam berdemokrasi dan berpartisipasi.

Dalam peran lainnya yang dilakukan organisasi Disabilitas ini setelah dihubungi oleh KPU dalah mereka memberikan masukan kepada KPU. Masukan yang dimasukkan adalah tentang saran kepada KPU sendiri dalam memfasilitasi kaum Penyandang Disabilitas ini pada saat Pemiluakada berlangsung. SIGAB sadar bahwa masih banyak diskriminasi dari masyarakat maupun pemerintah, hal ini menyebabkan pemiluakada ini masih jauh dari keyataan yang inklusi. Inklusi ini berarti terbuka serta akses terhadap kaum-kaum minoritas yang selama ini dipandang sebelah mata. Hal ini wajib dihapuskan karena dinilai sangat merugikan baik individu maupun kelompok. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh KPU dan organisasi penggiat Disabilitas, KPU mendapat masukan untuk lebih membuat sebuah sistem pemilu yang inklusi serta akses terhadap Penyandang Disabilitas.

Adapun beberapa hasil masukan kepada KPU menurut bapak Haris sebagai berikut :

1. Memastikan proses pendataan secara detail dan semua data harus lebih detail mengenai jumlah Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan agar

Penyandang Disabilitas tidak ada yang dilupakan hak suaranya, dan mereka juga masuk ke daftar pemilihan khusus dan tidak tergabung didalam pemilih umum. Karena apabila tergabung didalam daftar pemilih umum ini akan sangat merugikan Penyandang Disabilitas ini karena nantinya berdampak kepada fasilitas mereka saat pencoblosan berlangsung. Pendataan ini untuk benar benar memastikan penyandang Disabilitas sudah terdata dengan jelas.

2. Pihak KPUD agar memperhatikan segala bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU.
3. Melibatkan lebih banyak organisasi Disabilitas dalam rangka proses sosialisasi Pemilu. Hal ini bertujuan untuk merangkul Penyandang Disabilitas yang belum membuka diri terhadap demokrasi itu sendiri.
4. KPUD menyiapkan tempat pemungutan suara yang akses terhadap Penyandang Disabilitas.
5. KPUD wajib memfasilitasi ketersediaan informasi bagi Penyandang Disabilitas menurut jenis-jenis kecacatan. Hal ini bertujuan agar memudahkan Penyandang Disabilitas dalam hal mengakses informasi visi dan misi pasangan calon.

Didalam pelibatan organisasi Disabilitas ini memang ada beberapa yang termasuk didalam kepengurusan anggota Disabilitas. Salah satunya narasumber Ajiwan yang beliau tergabung didalam ke anggotaan SIGAB. Disini khusus Penyandang Tuna Netra rata-rata sudah aktif berperan didalam kegiatan organisasi, sehingga memudahkan mereka dalam hal mengakses informasi tentang pemahaman

Pemilu itu sendiri, baik yang dilakukan oleh SIGAB ataupun yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta.

3.1.1.3. Mengikuti Sosialisasi Pemilukada

Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan organisasi penggiat Disabilitas, mereka mengundang para individu Disabilitas ini untuk menghadiri sosialisasi tentang Pemilukada Yogyakarta 2017. Disini diberikan pemahaman tentang Pemilukada serta fasilitas yang dapat digunakan oleh partisipan Disabilitas di TPS nantinya. Akan tetapi banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh KPU. Hal ini disebabkan karena waktu yang tidak tepat serta informasi yang diberikan KPU tentang akan diadakan sosialisasi calon serta tata cara pencoblosan tidak sepenuhnya tersampaikan secara maksimal kepada setiap Penyandang Disabilitas. Sosialisasi dalam televisi juga kurang memfasilitasi pemahaman terhadap informasi yang didapat oleh Penyandang Tuna Rungu ini sendiri. Tidak adanya text didalam debat yang diadakan di televisi tidak terdapat text bahasa ataupun penerjemah isyarat yang ditampilkan. Ini merupakan kendala tersendiri yang dialami oleh Penyandang Disabilitas Tuna Rungu.

”Tidak ada juru bahasa atau pun text yang di tampilkan di televisi, itu yang membuat kami susah akan mendapat informasi untuk Pilkada ini. (wawancara narasumber Andhi Penyandang cacat Tuna Rungu pada tanggal 13 Juli 2017)

Memang benar adanya KPU melakukan proses sosialisasi terhadap komunitas tuli, akan tetapi banyak yang tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi itu karena mereka menganggap hal itu tidaklah penting serta akses informasi

tentang Pemilukada tidak jelas. Pemikiran seperti ini yang ingin dihapuskan oleh KPU dan Organisasi penggiat Disabilitas sebetulnya. Ini merupakan tanda bahwa pemikiran Penyandang Disabilitas tergolong apatis. Golongan Penyandang Disabilitas ini merupakan mereka yang tidak tergabung didalam organisasi atau aktif dalam kegiatan masyarakat. Rata rata mereka malu untuk keluar bahkan untuk masuk ke data pemilih sebagai kategori Disabilitas saja masih enggan untuk menyatakan diri mereka masuk kategori tersebut. Itu merupakan salah satu alasan Penyandang Disabilitas untuk tidak tertarik terhadap sosialisasi. Padahal sosialisasi ini bertujuan untuk menghimbau serta memberikan pemahaman serta memberikan akses kepada mereka dalam berpartisipasi.

“Buat apa ikut yang seperti itu mas, hak kami aja tidak terpenuhi sebagai pencoblos, sama aja nantinya juga seperti itu. Karena dari tahun ke tahun di TPS saya gitu-gitu aja, gak akses.”(wawancara narasumber M. Barokah Penyandang Disabilitas Tuna Daksa tanggal 14 Juli 2017)

Didalam sosialisasi dalam Pemilukada yang diikuti oleh Penyandang Disabilitas yang datang dari berbagai anggota organisasi Difabel. Mereka semua diajarkan oleh KPU serta disosialisasikan oleh KPU tentang sarana dan prasarana yang mendukung mereka dikategorikan dari berbagai kecacatan. Hal ini dibenarkan oleh KPUD kota sendiri. Memang sebagian Penyandang Disabilitas merasa puas dengan mengikuti sosialisasi yang di lakukan oleh KPUD sendiri, hal ini sesuai dengan pendapat dari narasumber Tuna Netra yang bernama Ajiwan. Beliau merasa puas dengan cara KPU mengajak serta mensosialisasikan Pemilukada ini kepada Penyandang Disabilitas Tuna Netra. Kepuasan ini dirasakan karena mereka

mendapat informasi yang cukup jelas tentang visi dan misi calon. Serta pada bulan Januari KPUD Kota Yogyakarta mengumpulkan para Penyandang Tuna Netra untuk diberikan pendidikan politik serta memberikan motivasi kepada Penyandang Tuna Netra sendiri akan pentingnya berpartisipasi.

“Temen-temen KPU mbak Sri Surani sangat kooperatif merangkul mendorong organisasi teman-teman kota untuk ikut aktif dalam Pemilu. Bahkan kami yang Netra dijelaskan mekanisme saat Pemilu, pemilihan seperti apa, bahkan tentang aksesnya nanti akan seperti apa. (wawancara narasumber Netra Ajiwan 12 Juli 2017)

Ketimpangan dalam informasi tentang sosialisasi yang diadakan oleh KPU merupakan hambatan tersendiri khususnya untuk Penyandang Tuna Netra yang berbeda dengan Tuna Netra yang rata-rata mengikuti sosialisasi yang diadakan KPU. Hal ini dikarenakan rata-rata Penyandang Disabilitas Netra aktif dan berperan didalam kegiatan ini, salah satunya narasumber yang bernama Ajiwan sebagai Penyandang Tuna Netra. Mereka tergabung didalam aplikasi percakapan smartphone yang menghubungkan antara Tuna Netra yang satu dan yang lainnya. Hal ini memudahkan dalam proses perolehan informasi, keaktifan Penyandang Disabilitas Tuna Netra dipertegas dengan hasil wawancara berikut.

“Jadi kami ada grup Wa disitulah kami berdiskusi serta bertukar informasi, bahkan disitu pula kami sharing tentang kekurangan pada pelaksanaan pemilu, sehingga saya sebagai perwakilan Netra bisa menyampaikannya ke KPUD Kota Yogya”. (wawancara narasumber Netra Ajiwan 12 Juli 2017)

3.1.1.4. Pengenalan Calon

Terkait dengan pemahaman pengenalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Penyandang Disabilitas Tuna Netra sudah mengerti dan faham ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap pasangan calon melalui media sudah cukup jelas,, seperti media website *SOLIDER* yang dikelola oleh narasumber Tuna Netra yaitu Ajiwan yang dimana website itu berisikan penjelasan serta mekanisme saat pemilihan serta berisikan visi dan misi calon yang di tulis oleh Ajiwan sebagai Penyandang Disabilitas sekaligus anggota SIGAB yang mana informasi ini di dapat dari KPUD Kota Yogyakarta. Jadi Penyandang Tuna Netra dinggap sudah sangat efisien dalam memperoleh informasi di dalam website tersebut.

“ Beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini melalui media, salah satunya media yang aku pegang yaitu SOLIDER. Salah satu kontributor kami juga sering menulis Pemilukada tentang calon kemudian mekanisme seperti apa yang Difabel Netra seperti apa nantinya itu sudah cukup jelas melalui media. Dan kammi juga mengikuti sosialisasi sebelum Pilkada, kami di jelaskan visi dan misinya seperti apa”. (wawancara narasumber Tuna Netra Ajiwan 12 Juli 2017)

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Rani sebagai Komisioner penerangan KPUD Kota Yogyakarta terkait informasi calon yang didapat oleh Penyandang Disabilitas. Didalam informasi calon beserta visi dan misiya dibedakan, dalam penelitian ini Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Tuna Rungu serta Tuna Daksa berbeda cara penyampaian informasinya. Penyandaang Disabilitas Tuna Netra itu dibuatkan drail yang berisikan visi dan misi pasangan calon serta pengenalaan calon. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi

Penyandang Disabilitas untuk mengenal calon serta faham dengan program yang ditawarkan oleh calon.

“ Kemarin info calon ada di drailkan tapi waktu sudah hampir dekat, haarusnya jauh-jauh hari”.(wawancara narasumber Ibu Rani Komisioner KPUD Kota Yogyakarta 10 Juli 2017)

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya kegiatan ini dilakukan pada waktu yang sempit terhadap hari pemilihan. Seharusnya dilakukan jauh-jauh hari pada saat sebelum masa tenang berlangsung. Sehingga peneliti merasa akan cukup efisien dalam perolehan informasi. Lain halnya yang terjadi di kalangan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu, mereka terkendala akses informasi terhadap calon melalui media. Informasi terhadap calon melalui media ini bertujuan agar informasi ini terbuka serta mudah di dapat oleh Penyandang Disabilitas yang tinggalnya jauh dari KPUD. Dan juga informasi melalui media ini bertujuan memudahkan bagi yang tinggalnya di desa-desa agar mengetahui informasi tentang Pemilukada serta informasi calon Pemilukada terpilih. Menurut narasumber Tuna Rungu beliau merasa kurang puas terhadap sosialisasi pengenalan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta, sebab didalam informasi melalui media tersebut tidak ditampilkan penerjemah isyarat yang mana penerjemah isyarat ini sangat berperan penting untuk Penyandang Tuna Rungu dan Wicara ini memperoleh informasi melalui media. Dan juga tidak semua dari Penyandang bisu dan tuli ini mengerti akan bahasa isyarat maka dari itu sangat diperlukan teks tertulis yang ditampilkan di media televisi agar Penyandang Tuna Rungu dan Wicara ini memahami calon yang akan dipilihnya sesuai program serta visi dan misi calon.

“Banyak sekali yang belum mengerti proses secara mendalam tentang visi dan misi pemahamannya belum maksimal. Tidak akses teks dalam acara berita, karna itu teman-teman jarang membuka tv. Juru bahasa isyarat itu ada ketika proses debat saja dan kadang-kadang teman-teman melihat debatnya saja, tetapi tidak semua tuli bisa berbahasa isyarat. (wawancara Tuna Rungu Andhi 13 Juli 2017)

Sebagai gantinya teman teman tuli ini memperoleh informasi dari mulut ke mulut teman teman Disabilitas sesamanya. Dari informasi yang didapat seperti itu tentu ke akuratan informasi dapat diragukan. Karena penyampaian visi misi dari mulut ke mulut itu merupakan sebuah persepsi dari orang ke satu kepada yang lainnya sehingga keakuratan informasi yang didapat perlu dipertanyakan.

“Mereka memperoleh informasi dari teman-teman saja, tetapi teman temannya ini juga belum tau mau mendukung Paslon yang mana. Dan juga visi dan misinya mereka belum memahami. Bisa jadi informasi yang disampaikan kepada teman lain ini tidak sesuai”. (wawancara Penyandang Tuna Rungu Andhi 13 Juli 2017)

3.1.1.5. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik yang di ikuti oleh Penyandang Disabilitas berkaitan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang berisikan menjamin hak-hak politik Penyandang Disabilitas. Konvensi ini jika dipahami dengan baik dapat digunakan sebagai instrumen bagi para Disabilitas. Terutama dalam mendorong negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, sedikit sekali Disabilitas yang mengetahui secara mendalam hak-hak politik mereka

berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan politik dan bermasyarakat termasuk didalamnya pemilu yang dijamin oleh CRPD. Konvensi ini sangat penting bagi mereka karena memastikan agar para Penyandang Disabilitas benar-benar memiliki akses yang efektif ke proses-proses politik. Hak politik ini merupakan hak menyumbangkan atau ikut berpartisipasi dalam pemilu. Disini peneliti lebih mefokuskan kepada hak politik yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas dalam Pemilukada Kota Yogyakarta 2017. Hak-hak politik ini mencakup pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah tentang pemahaman yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas tentang pentingnya suara mereka serta pentingnya penggunaan hak suara tersebut. KPUD Kota Yogyakarta sangat berperan dalam hal ini. KPUD memberikan pendidikan politik serta ajakan dan motivasi kepada Penyandang Disabilitas agar mau turut serta berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada ini.

Di penelitian ini diantara Penyandang Disabilitas, Penyandang Tuna Rungu serta Penyandang Disabilitas Daksa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bahwasannya hanya segelintir Penyandang Disabilitas yang memperoleh pendidikan politik dengan benar. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka untuk menghadiri acara seperti itu, masih banyak yang menganggap itu tidak penting dan para penyandang disabilitas ini rata-rata malu untuk keluar rumah, seperti yang disampaikan oleh narasumber KPU Ibu Rani

“Sebenrarnya itu kendala teknis ya, banyak yang tidak berorganisasi, tidak semua biasa keluar untu aktif di masyarakat itu yang menjadi kendala dalam melakukan pendidikan politik”. (wawancara Ibu Rani Komisioner KPU 10 Juli 2017)

Tentunya dalam mengatasi kendala teknis yang dialami oleh KPUD ini sendiri mempunyai cara dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bersama komunitas disabilitas dan di bantu oleh mahasiswa dan PPKPPS untuk masuk kedalam organisasi dan kemasing masing kecamatan untuk berbicara tentang Pemilu. Artinya disini KPUD Kota Yogyakarta berusaha menyadarkan Penyandang Disabilitas yang kurang terhadap pendidikan politik akan pentingnya partisipasi itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam usaha pemerataan pemahaman partisipasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Tabel 3.3
Jadwal kegiatan KPU Kota Yogyakarta

Waktu	Kegiatan	Tempat	Peserta
Senin, 23 Januari	Nonton bareng debat	Gedung serba guna Kel. WB	KPPS dan tokoh masyarakat
Minggu, 15 Januari 2017	sosialisasi		Difabel 12, pemilih pemula 38
Jumat 13 Januari 2017	Simulasi Putungsur	SMAN 7	300 orang terdiri dari pelajar 240 dan lainnya PPK, PPS, KPU, Media

Didalam hasil penelitian bersama Penyandang Tuna Netra, pendidikan yang dilakukan dirasa sudah cukup baik karena sebagian perwakilan mereka diundang ke KPU untuk mengikuti pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta.

“Di bulan Januari 2017 teman-teman KPUD Kota mengundang kami untuk memberikan pendidikan politik. Kan tinggal sebulan lagi kita dikumpulkan

dan di motivasi kenapa harus milih dan ya gitu gitulah". (wawancara dengan Peyandang Diasabilitas Tuna Netra 12 Juli 2017)

Namun hal berbeda justru di rasakan oleh Penyandang Tuna Rungu dan Wicara. Mereka memang benar diundang oleh KPU yang melakukan pendidikan politik serta motivasi akan berpartisipasi. Namun lagi lagi hal ini dirasa kurang bagi Penyandang Tuna Rungu ini dikarena tidak semuanya dapat mengikuti pendidikan politik seperti pengenalan calon dan visi misi serta simulasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta. Hal ini terkait dengan jadwal pemanggilan penyandang disabilitas kategori ini yang dirasa kurang tepat, dan juga memang sebagian ada yang merasa kurang tertarik dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta. KPUD kota sendiri didalam pendidikan politik ini juga melibatkan organisasi organisasi tuli seperti GERKATIN (gerakan kesejahteraan tuli indonesia) dan juga DAC (Deff Art Comunity).

"Pendidikan politik dalam rangka Pemilukada sendiri ada, tapi waktu itu tidak banyak yang ikut karena waktu dan informasi kurang jelas". (wawancara Penyandang Tuna Rungu Andhi 13 Juli 2017)

Artinya dari wawancara dengan Penyandang Disabilitas tuli ini, pendidikan serta sosialisasi yang dilakukan pada saat Pemilukada dirasa kurang. Seharusnya KPUD memiliki cara lain untuk merangkul Peyandang Disabilitas Tuli ini sendiri. Artinya harus ada terobosan atau penyesuaian waktu, serta pendidikan politik yang dilakukan haruslah lebih sering. Pendidikan politik yang sesering mungkin oleh KPUD Kota tentunya akan menumbuhkan rasa ketertarikan dari si Penyandang Disabilitas Tuna Rungu ini sendiri. Hal ini merupakan langkah pemerataan

terhadap pendidikan politik sert membangun mental para Penyandang Disabilitas, khususnya Tuna Rungu dan Wicara ini.

Hal serupa juga terjadi pada Penyandang Tuna Daksa. Mereka merasa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta itu kurang menarik perhatian mereka. Hal ini dikarenakan tidak ada simpati lagi untuk pemerintah. Artinya simpati ini adalah kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah tentang Pemilukada akan hak politik Penyandang Disabilitas Daksa ini. Narasumber Penyandang Disabilitas Tuna Daksa ini merasa kecewa terhadap Pemilukada-Pemilukada sebelumnya. Mereka merasa ketika kesadaran politiknya ada tetapi tidak didukung oleh implementasi di lapangan pada saat pemilihan yang dirasa kurang memihak Penyandang Disabilitas Daksa ini. Seperti tempat di TPS yang bertangga dan kotak pemilihan yang tinggi.

“Saya males ikut sosialisasi pendidikan Pilwali kemarin mas, karena saya rasa dari Pemilu Presiden kemarin saya ikutun tapi toh sama aja pas di TPS tempatnya pada gak akses”. (wawancara M. Barokah Penyandang Tuna Daksa 14 Juli 2017)

3.1.1.6. Simulasi Pencoblosan

Dalam proses sosialisasi ini KPU mengadakan simulasi secara serentak untuk memastikan penyelenggara pemilu siap melayani teman-teman difabel.

“Kami mengadakan simulasi secara serentak untuk memastikan bahwa penyelenggara kami itu siap melayani temen2 Difabel, karna yang paling sebenarnya ada banyak sisi bagaimana memastikan pemilih, dari segi penyelenggaranya juga harus dilakukan artinya penyelenggara juga harus punya perspektif bahwa ini adalah hak masyarakat yang harus di fasilitasi

artinya penyelenggara harus punya perfektif kesetaraan Difabel, serta pemilih juga memiliki kesadaran. Artinya kita melakukan dalam 2 sisi. Dari sisi penyelenggara kita pastikan itu, Dari sisi masyarakat kita bangun kesadaran. Untuk mempertemukan 2 hal yang kami lakukan, kami kami membuat simulasi di 14 kecamatan secara serentak, dari jam 8 sampai jam 2 pada hari yang sama untuk melakukan simulasi pemilihan, itu dilakukan sebelum masa tenang sebelum pemilihan yaitu hari sabtu. Itu dilakukan sosialisasi dengan pemilih yang beragam, itu teman-teman Difabel harus ada di masing2 kecamatan. Kemudian teman-teman PPK, PPK itu atwork di kecamatan, itu mengumpulkan pemilih Difabel disetiap kecamatan tersebut di 14 titik setiap kecamatan. Tujuannya untuk melihat kesiapan penyelenggaraan siap atau tidak melayani. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta 10 Juli 2017)

Untuk mempermudah pemahaman para pemilih Penyandang Disabilitas dalam menerima materi yang disampaikan selama sosialisasi, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengadakan alat peraga dan berusaha menjalin kerjasama terhadap pihak yang lebih mampu berkomunikasi secara efektif kepada Penyandang Disabilitas, yaitu simulasi Pemilukada langsung. Bagi Penyandang Disabilitas Netra, pelaksanaan sosialisasi dengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan template. Petugas sosialisasi harus sangat tekun untuk menjelaskan dan membimbing pemilih Penyandang Disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya. Karena hanya dengan mengandalkan suara saja, materi sulit untuk diterima secara mudah. Bagi pemilih Penyandang Disabilitas wicara dan/atau rungu, karena petugas sosialisasi merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas Wicara, maka KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau interpreter.

Dalam simulasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pada saat pemilihan berlangsung ini, yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta itu merancang semirip mungkin agar nantinya para pemilih Penyandang Disabilitas ini tidak kebingungan. Dalam simulasi ini juga bertujuan memberikan gambaran yang jelas pada proses pemilihan, serta untuk mengetahui juga kesiapan penyelenggara dalam menangani Penyandang Disabilitas. Didalam simulasi ini juga KPUD juga melibatkan mahasiswa dan organisasi disabilitas serta pihak penyelenggara KPPS untuk melakukan simulasi di 14 kecamatan.

Setelah melakukan proses simulasi di 14 kecamatan, tentu ada saran serta masukan masyarakat kepada KPU khususnya untuk penyandang Disabilitas. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kembali untuk KPU dalam menyiapkan aksesibilitas untuk pemilih Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta. Dalam melakukan tugas tugas serta program kerja dalam rangka pelaksanaan Pilkada tersebut KPU sendiri sedikit banyak dibantu oleh teman-teman SIGAB. Organisasi SIGAB ini sendiri adalah sebuah organisasi yang mewadahi serta sebagai penyambung tangan atas segala keluhan orang yang mempunyai kebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani sebagai Komisioner KPUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa pelaksanaan simulasi Pemilukada serentak 2017 ini hanya dilakukan satu kali kepada Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok Penyandang Disabilitas. Sedangkan tidak semua Penyandang Disabilitas tergabung dalam organisasi atau kelompok Penyandang Disabilitas. Akibatnya tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas. Hal ini dikarenakan pihak KPU kesulitan untuk menjangkau

keseluruhan keberadaan penyandang disabilitas. Tidak ada data valid tentang jumlah penyandang disabilitas yang ada di Yogyakarta bagian kota.

SIGAB didirikan karena merasa prihatin bahwa kaum penyandang disabilitas belum mendapatkan haknya secara penuh, dimana penyandang disabilitas ini masih menjadi kelompok masyarakat kelas dua, hampir disemua aspek kehidupan, baik itu berpendapat maupun berpartisipasi. SIGAB sendiri dalam Pemilukada pada tahun 2017 tidak terlalu intensif dalam mengawal Pemilukada di tahun 2017 alasannya adalah SIGAB tidak ingin terlalu mengambil peran dari pemerintah itu sendiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut.

“Kalau Pilwali kemarin SIGAB tidak terlalu intens mengawal Pilwali mas, tapi kita mendorong KPU untuk lebih aksesibel dan bahkan tidak hanya dikota saja di kulonprogo juga. Salah satunya dengan membuat temflet tuna netra, tapi videotron secara khusus tidak pada tahun ini tidak. (wawancara dengan Pak Haris munandar Wakil Direktur SIGAB tanggal 8 Juli 2017)

Akan tetapi SIGAB tetap bekerja sama dengan KPU Kota Yogyakarta agar menciptakan Pemilukada yang aksesibilitas serta inklusif. Walaupun, SIGAB tidak ikut dalam pemantauan Pemilukada 2017 ini, SIGAB mempunyai kader yang mengikuti pemantauan akan jalannya Pemilukada di 2017 kemarin. Tetunya kader-kader inilah yang mewakili SIGAB dan memberi tahu ke SIGAB akan jalannya Pemilu. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan Bapak Haris selaku Wakil Direktur SIGAB :

“Kita mempunyai beberapa kader seperti Ibu Widi di kota yang ikut terlibat di KPPS itu hasil didikan SIGAB. Dia ikut pemantauan dan aktif di masyarakat, nah itu sebenarnya yang kita inginkan”. (wawancara dengan Pak Haris Wakil Direktur SIGAB)

Didalam proses sosialisasi ini ada beberapa hambatan yang ditemui oleh KPU dalam mensosialisasikan Pemilukada yaitu hambatan teknis, karena banyak sekali penyandang disabilitas yang kurang berorganisasi serta malu untuk keluar sebagaimana kita ketahui masyarakatpun masih banyak yang memandang sebelah mata penyandang disabilitas ini. Sehingga memunculkan perasaan minder dan yang pada akhirnya mengucilkan diri sendiri.

“Tidak semua teman-teman Difabel itu sudah terbiasa berorganisasi, tidak biasa keluar dari rumah untuk aktif di masyarakat”. (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta 7 Juli 2017)

3.1.2. Pelaksanaan pada hari H

3.1.2.1. Pemberian suara/Voters

Pada saat hari pelaksanaan Pemilukada, KPU juga memastikan bahwa pihak penyelenggara di KPPS untuk menyiapkan bantuan di TPS. Hal ini mempunyai maksud dan tujuan agar di setiap TPS siap akan akses untuk penyandang disabilitas. Contohnya pada Penyandang Disabilitas Netra, di masing masing kecamatan dan TPS telah disediakan temflet di 794 KPPS (Komisioner KPU Ibu Rani). Dalam hal membantu Tuna Netra dalam hari pelaksanaan, petugas penyelenggara di setiap TPS membantu penyandang disabilitas dari mulai datang ke TPS lalu dilanjutkan ke giliran penyandang disabilitas itu untuk masuk ke bilik suara, sampai pada akhirnya mengelap tinta jari sebagai tanda pemilih.

“Di TPS disediakan kotak suara yang rendah, terus waktu saya datang saya digandeng dan ketika saya masuk ditawari mau pakai template gak, artinya pengetahuan mereka tentang aksesibilitas di tingkat TPS sudah bagus, saya nyoblos terus sesudah itu digandeng keluar. (wawancara dengan narasumber Tuna Netra Ajwan SIGAB pada tanggal 8 Juli 2017)

Tabel 3.4

Jumlah partisipan Disabilitas per Kecamatan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Pemilih Pemula	Jumlah Difabel
1	DANUREJAN	51	16.374	471	29
2	GEDONG TENGEN	46	15.070	433	42
3	GONDOKUSUMAN	82	30.891	882	84
4	GANDOMANAN	29	11.647	314	39
5	JETIS	43	19.554	545	58
6	KOTAGEDE	65	23.054	660	94
7	KERATON	44	17.117	511	70
8	MANTRIJERON	69	25.661	725	74
9	MERGANGSAN	73	23.881	669	55
10	NGAMPILAN	32	12.898	365	28
11	PAKUALAMAN	22	8.424	238	26
12	TEGALREJO	61	26.351	746	68
13	UMBULHARJO	134	47.683	1.422	67
14	WIROBRAJAN	43	20.384	555	103
	Jumlah	794	298.989	8.536	837
	Jumlah disabilitas yang berpartisipasi				340

Untuk penyandang disabilitas Tuna Daksa sendiri, KPU memerintahkan di setiap TPS itu akses untuk pengguna kursi roda, hal ini di peruntukan untuk kaum Penyandang Disabilitas agar mudah dalam mencapai TPS. KPU Kota Yogyakarta sendiri mengatakan bahwa dalam mewujudkan aspek kesetaraan bagi penyandang disabilitas KPU Kota Yogyakarta sendiri memerintahkan agar penyelenggara di TPS mau berkontribusi mewujudkan hal ini. Menurut penuturan Ibu Rani selaku

Komisioner KPU, apabila ada pemilih penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan, maka petugas TPS harus membantu, apabila ada permintaan untuk menjemput dari rumah ke TPS, KPU dan TPS siap menjemput. Upaya- seperti ini adalah bentuk keseriusan KPU dalam meningkatkan partisipasi penyandang Disabilitas.

Pada fasilitas yang diberikan di TPS untuk penyandang disabilitas Tuna Rungu terjadi hal yang tidak berkenan, seharusnya di TPS yang ada penyandang Tuna Rungu di sediakan penerjemah bahasa isyarat sehingga pada saat di TPS tidak penyandang disabilitas ini tahu kapan gilirannya. KPUD sendiri seharusnya membuat terobosan pada saat pemilu utuk tidak mengedepankan saja pada saat pemanggilan tetapi lebih mengedepankan visual seperti nomor urut yang di tampilkan dilayar monitor, agar apabila tidak penyandang disabilitas yang datang ke TPS tidak dengan pendamping maka ia bisa dimudahkan dengan melihat visual nomor urut. Hal seperti inilah yang terjadi di TPS pada saat Pemilu pada berlansung, seperti yang diungkapkan narasumber Andhi sebagai berikut :

“Jadi waktu datang ke TPS untuk manggil nama itukan dipanggil, nah itu yang menjadi masalah sebagai orang tuli tidak mendengar ketika dipanggil, memang itu bukan sebuah masalah besar tapi itu sangat tidak membuat kami nyaman, misalnya ada tetangga yang manggil kita tergesa gesa memberi tahukan giliran kita, semua mata tertuju ke kita, itu yang membuat tidak nyaman dan kebetulan tidak ada pendamping yang di sediakan di TPS”. (wawancara Penyandang Tuna Rungu Andhi 13 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas menandakan bahwasanya Disabilitas Tuna Rungu yang peneliti wawancara merasa terintimidasi sosial mereka malu karena di

perlakukan seperti itu dan memang di tempat TPS yang mas Andhi ini tidak ada pendamping pada saat hari pelaksanaan pencoblosan.

*“Di TPS itu rata rata memakai pendopo pendopo siapa, memakai balai RW kalau fasilitas publik memang saya akui belum memenuhi itu juga menjadi PR bagi KPU sendiri untuk membangun fasilitas ramah Difabel.”
(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Yogyakarta 7 Juli 2017)*

Pada saat hari H Pemilukada KPU sudah mau melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagaian dari KPPS. ini artinya KPU telah sangat membuka tangan serta benar benar mendorong para penyandang disabilitas bukan hanya untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan hak suaranya, tetapi juga mendorong untuk berpartisipasi sebagai pihak penyelenggara, dari mulai mengawasi, pemantauan dll.

“Saya bisa ikut terlibat didalam KPPS itu karena saya banyak mengikuti pendidikan politik, baik yang diadakan SIGAB, ataupun seminar seminar tentang politik, mas. Dari karena itu mas di wilayah saya orang orang menganggap saya tahu tentang Pemilu”. (wawancara Ibu Widi penggiat oraganisasi Difabel Daksa taggal 10 Juli 2017)

Pada saat hari pelaksan belum semua TPS menerapkan apa yang telah di perintah kan oleh KPU tentang akses disabilitas. Artinya, hanya ada beberapa TPS saja yang sudah benar-benar siap serta akses terhadap peyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan oleh penyelenggara di TPS tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh narasumber Penyandang Tuna Daksa.

“Kemarin saya liat di TPS pas hari Pemilu, terus saya liat TPS nya pakai tangga seperti di pendopo desa gitu, jadi saya berfikir susah untuk naik naik lagi, nah jadi saya malas buat dateng. Kalau Pilwali 2011 saya milih tapi ya itu saya harus merangkak untu naik ke pendopo, gak ada yang bantuin. Jadi alasan saya gak ikut ya karena tempatnya itu tidak akses buat orang seperti saya. (wawancara M. Barokah Penyandang Disabilitas Tuna Daksa tanggal 9 Juli 2017).

3.1.3. Pasca Pemilu

Pelaksanaan pada hari H pemilu jauh dari yang di harapkan oleh KPU akan keikutsertaan partisipan khususnya pada penyandang disabilitas. Hanya 340 penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi dari total 837 penyandang (KPU Yogyakarta).

Tabel 3.5**Presentase Jumlah Disabilitas Yang Menggunakan Suara**

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang menggunakan hak pilih	%
1	DANUREJAN	29	22	75,86
2	GEDONG TENGEN	42	16	38,10
3	GONDOKUSUMAN	84	44	52,38
4	GANDOMANAN	39	17	43,59
5	JETIS	58	12	20,69
6	KOTAGEDE	94	34	36,17
7	KERATON	70	30	42,86
8	MANTRIJERON	74	28	37,84
9	MERGANGSAN	55	23	41,82
10	NGAMPILAN	28	15	53,57
11	PAKUALAMAN	26	11	42,31
12	TEGALREJO	68	19	27,94
13	UMBULHARJO	67	25	37,31
14	WIROBRAJAN	103	44	42,72
	Jumlah	837	340	40,62

Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik ataupun akses yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (Apatis), dikarenakan banyak sekali masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Seperti tabel diatas yang menunjukkan partisipasi penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta yang rendah dan tidak mencapai 50% dari yang terdaftar sebagai DPT. Hal ini pun sejalan dengan yang dikatakan narasumber Ajiwan Penyandang Disabilitas Tuna Netra:

“Tidak menutup kemungkinan banyak yang berfikir kenapa ikut-ikutan kayak gitu toh sama saja, ah ngo ki ora akses, pasti seperti itu (wawancara narasumber Tuna Netra Ajiwan pada tanggal 9 Juli 2017).

Tentunya hal ini berkaitan dengan aksesibilitas di setiap TPS. Masih banyak TPS yang belum akses kepada penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas mempunyai beragam kebutuhan khusus untuk ikut berpartisipasi. Ini juga merupakan kekurangan dari belum matangnya sosialisasi di KPPS untuk menciptakan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini merupakan hal yang tidak terduga oleh KPU sendiri sebagai petugas penyelenggara, hal ini dikarenakan belum meratanya sistem yang diterapkan di masing-masing TPS. Hal ini dibuktikan dengan angka pemilih pada saat Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017. KPU sendiri mengevaluasi kinerja serta penerapan di lapangan dengan harapan agar untuk pemilu selanjutnya bisa merata akses serta informasi untuk penyandang disabilitas ini, seperti yang dikatakan narasumber :

“Itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) di penyelenggara Pemilu, untuk memastikan kepastian data di awal agar Difabel tidak masuk ke kategori umum. Terkait angka partisipasi itu kedepannya harus saya cari DPS dan saya pastikan di pemilu berikutnya”. (wawancara Ibu Rani Komisioner KPU 10 Juli 2017)

Walaupun angka yang jauh dari harapan ini KPU terus berusaha meningkatkan kinerja dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas di Kota Yogya pada Pemilukada tahun berikutnya.

Dalam hal pemantauan perhitungan suara rata-rata penyandang disabilitas ini tidak semua mengikuti secara langsung, mereka hanya melihat dari pantauan

perolehan suara di televisi saja. Yang mengikuti pemantauan Quick Count di televisi mereka ingin tahu apakah paslon pilihannya terpilih sebagai pemimpin mereka selanjutnya atau tidak. Dengan harapan paslon pilihannya ini bisa membawa dampak positif yang menguntungkan kelompok disabilitas ini. Sedangkan yang tidak mengikuti pemantauan langsung maupun pemantauan media ada dua jenis kategori yaitu pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dan yang tidak. Rata rata yang tidak mengikuti kegiatan pemantauan suara ini adalah yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan, alasan mereka beragam mulai dari tidak tertarik terhadap calon dan ada yang menganggap hal tersebut tidak ada manfaatnya bagi mereka karena belum tentu calon terpilih itu memikirkan penyandang disabilitas.

Tabel 3.6
Kategori bentuk partisipasi Disabilitas

NO.	Kategori Disabilitas	Aktif	Pasif	Radikal	Apatis
1.	Tuna Netra	√	-	-	-
2.	Tuna Rungu dan Wicara	-	-	-	√
3.	Tuna Daksa	-	-	-	√

Dapat dilihat dari tabel pengkategorian partisipasi disabilitas diatas, rata-rata penyandang disabilitas Tuna Netra termasuk dalam kategori partisipasi aktif, dikarenakan ikut berperan aktif dan terlibat dari awal dilaksanakannya sosialisasi sampai pada hari pelaksanaan. Akan tetapi untuk penyandang disabilitas Tuna Rungu dan Wicara serta Tuna Daksa tergolong kedalam bentuk partisipasi apatis hal ini dikarenakan hasil waawancara dengan narasumber yang menuturkan

bahwasannya mereka kurang puas terhadap kebijakan pemerintah serta sarana dan prasarana yang di sediakan di TPS tempat mereka memilih belum ramah terhadap penyandang disabilitas kategori ini. Hal ini juga yang menyebabkan partisipasi yang sedikit seperti yang di jelaskan pada tabel sebelum ini.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017

Penting bagi seseorang dalam menggunakan hak suara. Ini merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu memberikan peran secara aktif menentukan wujud dari penyelenggaraan tersebut. Salah satu sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui kegiatan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Eksistensi kelembagaan Pemilihan Umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersandikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pemilihan Umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi. Kegiatan Pemilihan Umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya

penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum, memperlambat penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa per setujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga Pemilihan Umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas ini dalam berpartisipasi dalam Pemilukada serentak di Kota Yogyakarta tahun 2017 sebagai berikut :

3.2.1. Kesadaran Politik Seseorang

Kesadaran politik merupakan hal yang sangat mendasar bagi seseorang dalam ikut terlibat dan berpartisipasi. Jika seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, tentunya akan ikut berpartisipasi dalam politik. Partisipasi didalam politik disini dimaksudkan menggunakan hak suara dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017 yang secara khusus dibahas berkaitan dengan penyandang Disabilitas yang mana di Kota Yogyakarta sendiri dari 837 DPT yang berpartisipasi hanya 340 penyandang disabilitas. Artinya hanya 40% dari jumlah tersebut yang berpartisipasi. Kesadaran akan berpartisipasi itu sangatlah penting, apalagi satu suara itu sangat menentukan

dalam perolehan suara masing-masing calon. Maka dari itu kesadaran politik ini dibangun oleh :

3.2.1.1. Keterlibatan Dalam Organisasi

Kesadaran politik ini diperoleh dari pendidikan politik yang tentu saja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi bisa dari organisasi-organisasi penggiat hak suara masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Salah satu hal yang jelas untuk melihat kesadaran politik para penyandang disabilitas adalah dengan melihat keterlibatan mereka pada organisasi disabilitas. Mereka yang tergabung aktif dalam organisasi disabilitas ini bisa dikatakan lebih sadar politik daripada mereka yang tidak tergabung dalam organisasi. Misalnya dalam hal pengetahuan tentang partai-partai, pengenalan terhadap calon, pengetahuan tentang profil calon dan program yang ditawarkan serta pengetahuan tentang hak-hak politik mereka. Penyandang Disabilitas Tuna Netra yang terlibat aktif dalam organisasi disabilitas memiliki informasi politik yang lebih baik dari segi kualitasnya. Hal ini bisa di pahami karena para Disabilitas Tuna Netra yang tergabung dalam organisasi memiliki kesempatan untuk mengikuti pergaulan secara luas, tetapi berbeda dengan yang tidak aktif di kegiatan sosial ataupun organisasi, seperti yang diutarakan oleh narasumber Tuna Netra yang tergabung serta aktif di organisasi SIGAB berikut wawancaranya :

“Banyak sekali teman teman Difabel yang malu untuk muncul di masyarakat, kebanyakan mereka juga gak mau bergabung dikarenakan masih malu dianggap Disabilitas, kayak mana mau ikut pemilu, dari dirinya

sendiri aja gak mau diberi masukan”. (Wawancara dengan Penyandang Tuna Netra Ajiwan 12 Juli 2017)

Sejatinya kesadaran politik penuh akan berpartisipasi adalah bentuk dari keperdulian warga kota itu sendiri untuk ikut serta dalam membangun kotanya agar menjadi lebih baik. Sebuah kota yang maju adalah gambaran dari masyarakatnya yang berdaulat dan perduli.

“Masa depan Kota Jogja itu disitu karna selama ini masih banyak yang merasa bahwa hakku belum terakomodasi, banyak aspek yang kami belum puas, untuk merubah itu semua kami ya harus turut bertsanggung jawab untuk menentukan kota jogja kedepannya seperti apa”. (wawancara Ajiwan Tuna Netra 12 Juli 2017)

Artinya sikap perduli dan mau menyumbangkan hak suaranya merupakan salah satu bentuk partisipasi seseorang. Seperti yang dikatakan Jerffry M. Paige dalam Surbakti (2007) mengatakan pembagian bentuk-bentuk dari partisipasi ada 4 yaitu partisipasi aktif, pasif, militan radikal, apatis.

3.2.1.2. Pendidikan Politik

Dalam kesadaran politik ini juga terdapat faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan kesadrannya berpartisipasi yaitu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik bertujuan memberikan informasi serta tata cara didalam penggunaan hak suara. Berbicara hak suara disabilitas yang merupakan hak dalam berpartisipasi tentunya ini beriringan dengan pemahaman politik yang berkesinambungan. Artinya seseorang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya tentunya penyandang disabilitas itu mengerti mengapa ia harus

berpartisipasi dan untuk apa ia berpartisipasi. Jika pendidikan politik serta pemahaman akan politik tidak terpenuhi maka kesadaran akan berpartisipasi menjadi rendah. Pendidikan politik itu bisa diperoleh dari berbagai macam cara seperti media televisi, koran, serta seminar seminar yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan politik juga harus dilakukan tidak hanya pada saat mau Pemilu atau Pemilukada saja. Akan tetapi lebih baiknya dilakukan secara terjadwal.

“Soal pendidikan politik ada, tapi hanya pada momen momen tertentu sekedar kalo ada even pemilihan saja”. (Wawancara Ajiwan Tuna Netra 12 Juli 2017)

Menurut narasumber Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Daksa pemerintah masih belum ada melakukan pendidikan politik secara konsisten. Hal ini juga sebagai penghambat seseorang untuk benar benar paham untuk ikut berpesta demokrasi.

“Untuk pendidikan politik sendiri masih belum ada dilakukan pemerintah hanya saja diskusi diskusi untuk menghimpun usulan”. (wawancara Andhi Disabilitas Tuna Rungu 13 Juli 2017)

Didalam pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta masih kurang cukup, sebab pendidikan yang dilakukan masih belum mencakup semuanya. Yang artinya pada saat pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah belum mencakup seluruh Penyandang Disabilitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam berpartisipasi menyuarakan suara. Dan sangat disayangkan pendidikan

politik ini hanya dilakukan pada saat moment-moment Pemilu saja, tidak rutin dilakukan.

Tidak hanya KPU saja yang melakukan pendidikan politik terhadap Penyandang Disabilitas ini, tetapi banyak juga organisasi penggiat Disabilitas yang melakukannya. Seperti SIGAB, SAPDA, NAWACITA dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini juga kalangan LSM masih kesulitan untuk menjangkau Penyandang Disabilitas agar mau mengikuti pendidikan politik. Masih banyak yang tidak mau mengikuti pendidikan politik, dikarenakan mereka merasa malu dan mereka berfikir tentang pentingnya untuk ikut kegiatan seperti itu. Padahal sejatinya pendidikan politik ini berguna agar masyarakat itu mengetahui akan hak dan kewajiban yang mereka punyai.

3.2.2. Penilaian Apresiasi Terhadap Pemerintah

Penilaian apresiasi terhadap pemerintah ini berkaitan dengan kepuasan seseorang terhadap pemerintahnya. Dalam hal ini keuntungan untuk individu atau kalangan-kalangan tertular yang dapat menjadi sebuah kesimpulan terhadap tinggi rendahnya antusias seseorang dalam berpartisipasi khususnya Penyandang Disabilitas. Banyak sekali ketidak puasan terhadap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah terhadap akses pelayanan publik. Seperti akses transportasi umum, infrastruk, kesehatan. Hal ini juga yang merupakan penyebab rendahnya partisipasi pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

3.2.2.1. Aksesibilitas dan Pelayanan Publik

Dalam akses publik yang diperoleh penyandang disabilitas dinilai masih tidak memihak penyandang disabilitas. Terutama Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Tuna Daksa. Seperti di bus Trans Yogyakarta yang tidak mendukung tempat untuk mengantrinya kursi roda serta trotoar yang tinggi. Hal ini menyulitkan penyandang disabilitas daaksa dalam mengakses transportasi publik. Berbicara tentang akses, tinggi rendaahnya antusias yang diberikan penyandang disabilitas ini juga berpengaruh terhadap akses pada tempat TPS. Tempat TPS yang mendukung para Disabilitas dalam menggunakan hak suaranya perlu di tinjau kembali. Karena ini berdampak kepada hasil pemungutan suara seperti dibawah ini :

Tabel 3.7

Presentase partisipasi Disabilitas

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang menggunakan hak pilih	%
1	DANUREJAN	29	22	75,86
2	GEDONG TENGEN	42	16	38,10
3	GONDOKUSUMAN	84	44	52,38
4	GANDOMANAN	39	17	43,59
5	JETIS	58	12	20,69
6	KOTAGEDE	94	34	36,17
7	KERATON	70	30	42,86
8	MANTRIJERON	74	28	37,84
9	MERGANGSAN	55	23	41,82
10	NGAMPILAN	28	15	53,57
11	PAKUALAMAN	26	11	42,31
12	TEGALREJO	68	19	27,94
13	UMBULHARJO	67	25	37,31
14	WIROBRAJAN	103	44	42,72
	Jumlah	837	340	40,62

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasannya pada kecamatan Danurejan memiliki tingkat partisipasi yang sangat aktif pada penyandang disabilitas yang mencapai 75%, hal ini di karenakan PPS di Kecamatan Danurejan sangat baik dalam menyediakan sarana serta prasarana untuk memudahkan penyandang disabilitas memilih seperti drail dan pendamping untuk Tuna Netra, lalu pendmping untuk Tuna Rungu serta petugas yang ikut aktif di dalam memabantu Tuna Daksa untuk penyaluran suara. Akan tetapi hal itu tidak tercermin pada Kecamatan Jetis yang hanya 20% pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (Apatis), dikarenakan banyak sekali masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Seperti tabel diatas yang menunjukkan partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Yogya yang rendah dan tidak mencapai 50% dari yang terdaftar sebagai DPT adalah 837 dan yang memilih hanya 340 penyandang disabilitas saja. Hal ini pun sejalan dengan yang dikatakan narasumber Ajiwan Penyandang Disabilitas Tuna Netra:

“Tidak menutup kemungkinan banyak yang berfikir kenapa ikut-ikutan kayak gitu toh sama saja, ah ngo ki ora akses, pasti seperti itu (wawancara narasumber Tuna Netra Ajiwan pada tanggal 9 Juli 2017).

Sejatinya dalam pembahasa faktor yang menjadi penyebab besar kecilnya antusias partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dalam Pemilu

2017. Banyak dari Penyandang Disabilitas yang kurang puas terhadap akses pelayanan kesehatan dan akses sarana prasarana publik yang dirasa kurang memihak terhadap penandang disabilitas ini. Kesetaraan pelayanan publik baik dari aspek kesehatan aspek aksesibilitas transportasi umum, lapangan pekerjaan kurang dianggap memihak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari akses di transportasi publik yang tidak adanya tempat tunggu untuk Penyandang Disabilitas Tuna Daksa. Di halte Trans Yogya saja tempat tunggu akan berhentinya bus tinggi sehingga dirasa kurang mendukung bagi penyandang disabilitas ini.

“Saya tidak nyoblos karena pemerintah gak mempunyai solusi buat Disabilitas Daksa ini. Buat apa nyoblos mereka belum tentu mikirin kita. Mau kemana-mana susah, halte trans Yogja itu sulit,tempatnya gak akses”.
(wawancara Penyandang Disabilitas Daksa M. Barokah 9 Juli 2017)

Fasilitas-fasilitas umum seharusnya dibangun juga untuk menjadi lebih akses dan berpihak kepada Penyandang Disabilitas ini. Kesetaraan hak adalah yang utama bagi Penyandang Disabilitas, dengan adanya kesetaraan yang ditunjukan oleh pemerintah hal tersebut akan membangun kepercayaan publik khususnya Penyandang Disabilitas. Dari sebuah kepercayaan maka penyandang disabilitas merasa mereka diperhatikan maka mereka akan ada niat untuk membangun kotanya menjadi lebih baik. Salah satu caranya dengan aktif berpartisipasi dalam Pemilukada.

Begitu pula dalam hal pelayanan kesehatan, dalam hal pelayanan ini dirasa masih sangat kurang serta tidak memihak bagi Penyandang Disabilitas khususnya Penyandang Tuna Rungu. Karena dari segi pelayanan kesehatan pun penyandang

disabilitas ini di pandang sebelah mata. Artinya dari pelayanan rumah sakit yang tidak mendukung dalam hal berkonsultasi antara pasien Tuna Rungu dengan dokter. Rumah sakit khususnya rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah harusnya memiliki sarana dan prasarana untuk mendengarkan konsultasi dari penyandang Disabilitas Tuna Rungu ini. Contohnya adanya penerjemah bahasa isyarat yang ada di setiap rumah sakit yang di kelola oleh pemerintah.

“Waktu saya sakit datang kerumah sakit, pada saat itu istri saya tidak bisa ikut. Saya mau meminta formulir pendaftaran saja pada bagian administrasi susah karena mereka tidak mengerti apa yang saya utarakan. Begitu juga dengan dokternya, ia tidak mengerti apa yang saya keluhka”. (wawancara Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Andi 13 Juli 2017)

Begitu juga dalam hal pekerjaan. Penyandang Disabilitas ini masih kecil dalam hal mendapat pekerjaan. Padahal mereka mendapat angka 1% untuk bekerja di setiap perusahaan swasta (narasumber Andi Tuna Rungu). Akan tetapi kenyataannya adalah mereka tidak mendapat kesempatan seperti yang telah dikatakan pemerintah kepada mereka. Kebanyakan yang diterima adalah mereka Penyandang Disabilitas Daksa. Artinya kesetaraan mendapat kehidupan yang layak masih dirasa sangat kurang. Keberpihakan yang merata sangat diinginkan oleh seluruh Penyandang Disabilitas ini. Segala sarana dan prasarana yang di bangun oleh pemerintah harus memuaskan dari berbagai kalangan, tidak seperti sekarang yang masih kurang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Karena ini merupakan hal yang menentukan terhadap kepuasan seseorang khususnya Penyandang Disabilitas yang nantinya akan memunculkan kepercayaannya terhadap pemerintah sehingga mau ikut berpartisipasi. Dan juga,

Penyandang Disabilitas ini akan timbul jiwa nasionalis dalam membangun daerah apabila mereka dianggap ada, terlebih lagi apabila mereka bisa ikut dalam kegiatan pemerintah, tidak hanya sewaktu Pemilu kada berlangsung saja.